



SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE:
www.dpr.go.id

Nomor : 577/PI.03.02/IX/2023 Jakarta, 08 September 2023
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Internal atas
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 di
Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan
ORGanisasi Sekretariat Jenderal DPR
RI

Yth. Kepala Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional
Sekretariat Jenderal DPR RI

Berdasarkan Surat Tugas Inspektur II Nomor: 268/PI.03.02/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023, dengan hormat Kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Internal atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 di Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2643/SEKJEN/2022 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Sekretariat Jenderal DPR RI, maka Inspektorat II telah melakukan Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja di Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional tahun 2023.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana akuntabilitas kinerja di Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Khususnya bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); menilai tingkat implementasi SAKIP; menilai tingkat akuntabilitas kinerja; memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. Evaluasi SAKIP merupakan bagian dari siklus manajemen kinerja instansi pemerintah/unit kerja yang dilaksanakan untuk mendorong unit kerja untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

Ruang lingkup evaluasi internal adalah melakukan penilaian atas :

- a. Kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
- b. Pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja.

- c. Pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja yang dapat memberikan dampak dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.
- e. Capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

Pelaksanaan evaluasi internal di Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif berdasarkan peraturan, disesuaikan dengan tujuan dan mempertimbangkan kendala yang ada.

2. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi internal atas akuntabilitas kinerja di Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional menunjukkan nilai **“68,10”** dengan predikat **“B”**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja di Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional **“Baik”**. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

| No. | Komponen Yang Dinilai | Bobot | Nilai |
|--------------------------------------|---|------------|--------------|
| 1. | Perencanaan Kinerja | 30 | 22,80 |
| 2. | Pengukuran Kinerja | 30 | 19,20 |
| 3. | Pelaporan Kinerja | 15 | 10,35 |
| 4. | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25 | 15,75 |
| Nilai Hasil Evaluasi | | 100 | 68,10 |
| Tingkat Akuntabilitas Kinerja | | | B |

Hasil evaluasi tahun 2022 **“tidak dibandingkan”** dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena Inspektorat Utama baru melaksanakan evaluasi internal SAKIP Tingkat Eselon II di tahun ini. Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi internal akuntabilitas kinerja pada Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Indikator dan target kinerja pada Perjanjian Kinerja Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional sudah selaras dengan indikator dan target kinerja pada Perjanjian Kinerja dan Renstra Deputy Bidang Persidangan. Ukuran keberhasilan yang dituangkan dalam Indikator Kinerja Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional sudah disusun secara *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time based* (SMART), target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja juga dapat dicapai (*achievable*), menantang, dan realistis. Terdapat perubahan Rencana Strategis Deputy Bidang Persidangan, namun target kinerja pada Perjanjian Kinerja di Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional telah selaras dan mencerminkan terwujudnya target kinerja pada Renstra Eselon I.

Terdapat hal - hal lainnya yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja di Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional diantaranya adalah:

- 1) Perencanaan kinerja di Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional belum seluruhnya dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan serta aktivitas

antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*crosscutting*) di Sekretariat Jenderal DPR RI.

- 2) Rata - rata pencapaian target dalam perencanaan kinerja Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional sampai dengan Semester I tahun 2023 adalah 96%. Namun tidak terlihat bahwa adanya penyesuaian/perubahan pada anggaran dilakukan berdasarkan pada capaian atas perencanaan kinerja.

b. Pengukuran Kinerja

Pemantauan dan pengukuran capaian kinerja di Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional telah dilaksanakan secara berjenjang melalui e-kinerja. **Namun demikian terdapat hal - hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja di Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional, yaitu:**

- 1) Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional telah menyampaikan laporan realisasi anggaran dan capaian kinerja dalam rapat BURT. Namun, pembahasan dan pemantauan yang dilakukan terbatas pada pengumpulan hasil pengukuran capaian atas realisasi anggaran di Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional, sehingga belum relevan untuk mengukur seluruh capaian kinerja yang diharapkan.
- 2) Monitoring dan Evaluasi (Monev) atas Renaksi di Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional telah dilaksanakan setiap semester, namun perbaikan kinerja tidak didasarkan pada hasil Monev tersebut.
- 3) Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional sudah menyusun Rencana Aksi, namun belum terdapat revisi atas Renaksi, sehingga belum terlihat apakah pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja, dan pengukuran kinerja telah digunakan untuk perbaikan Renaksi.
- 4) Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja. Revisi atas penyesuaian anggaran belum dilaksanakan berdasarkan revidu atas pengukuran capaian kinerja.

c. Pelaporan Kinerja

Sebagai suatu bentuk komitmen menerapkan prinsip - prinsip *good governance* dalam memberikan layanan publik, Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional telah memiliki Maklumat Standar Pelayanan. Laporan kinerja juga telah memuat upaya untuk perbaikan layanan dan mengungkap kendala yang dihadapi dalam mencapai kinerja.

Namun demikian terdapat hal - hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja di Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional, yaitu:

- 1) Laporan kinerja belum memuat perbandingan realisasi dengan target jangka menengah. Target yang ditetapkan dalam Renstra dapat menjadi acuan dalam evaluasi realisasi sekaligus penetapan target rencana kerja yang akan datang.
- 2) Laporan kinerja tidak terdapat penjelasan dan analisis bagaimana informasi dalam laporan kinerja tahun sebelumnya digunakan untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan atas Rencana Aksi yang telah disusun. Salah satu input yang dapat digunakan dalam penyusunan rencana aksi, penyesuaian penggunaan anggaran dan pencapaian keberhasilan kinerja adalah dengan menggunakan informasi dalam laporan kinerja.

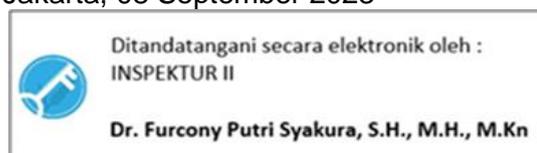
3. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas, kami merekomendasikan beberapa hal, dan kami mendorong agar Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional dapat menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang terdapat dalam LHE internal SAKIP untuk perbaikan kinerja di Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional sebagai berikut:

- a. Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Organisasi dalam menyelaraskan perencanaan kinerja yang memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*crosscutting*)
- b. Melakukan monev setiap bulan atas capaian Rencana Aksi di Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional, menyusun revisi Renaksi apabila diperlukan penyesuaian, serta memanfaatkan hasil pemantauan seluruh capaian kinerja untuk meningkatkan pencapaian target yang akan datang, tidak hanya capaian realisasi anggaran.
- c. Dalam melakukan penyesuaian anggaran, memasukkan analisis keterkaitan perubahan anggaran dengan pencapaian kinerja yang diharapkan, atau dampak dari penyesuaian anggaran dengan peningkatan kinerja.
- d. Memasukkan informasi dalam laporan kinerja mengenai perbandingan realisasi dengan target jangka menengah di setiap Indikator Kinerja, sebagai salah satu cara dalam mengevaluasi target dan realisasi, sekaligus penetapan target rencana kerja yang akan datang.
- e. Memasukkan dalam laporan kinerja berupa penjelasan dan analisis mengenai bagaimana hambatan dan kendala yang ada tahun sebelumnya telah diatasi, sehingga terlihat adanya evaluasi dalam pencapaian keberhasilan kinerja. Serta laporan kinerja digunakan untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan atas Rencana Aksi yang telah disusun.

Demikian disampaikan hasil evaluasi internal SAKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 08 September 2023



Tembusan:

1. Plh. Inspektur Utama Sekretariat Jenderal DPR RI;
2. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi.
Sekretariat Jenderal DPR RI